

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Evaluasi Kebijakan Penertiban Rumah Kos dan Penginapan dalam Mendukung Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Bojonegoro menggunakan model evaluasi Context, Input, Process, Product (CIPP) yang dikembangkan oleh Stufflebeam, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Context (Konteks) menunjukkan bahwa kebijakan penertiban rumah kos dan penginapan dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah rumah kos di Kabupaten Bojonegoro yang diikuti dengan berbagai permasalahan, seperti rumah kos yang belum memiliki izin, kurangnya pendataan identitas penghuni, serta aktivitas yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan penertiban merupakan kebutuhan yang relevan untuk menjaga ketertiban umum.
2. Input (Masukan) menunjukkan bahwa Satpol PP Kabupaten Bojonegoro telah memiliki sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran dalam melaksanakan kebijakan penertiban rumah kos dan penginapan. Namun demikian, jumlah personel yang tersedia masih belum sebanding dengan luas wilayah pengawasan dan banyaknya rumah kos yang harus diawasi sehingga menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan kebijakan.

3. *Process* (Proses) menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan telah berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan melalui patroli rutin, Operasi Yustisi, pendataan, koordinasi dengan instansi terkait, serta pembinaan kepada pelanggar. Meskipun demikian, pelaksanaan penertiban masih menghadapi beberapa hambatan, seperti keterbatasan personel, luasnya wilayah pengawasan, keterbatasan anggaran operasional, dan kebocoran informasi sebelum operasi dilaksanakan sehingga efektivitas pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya optimal.
4. *Product* (Hasil) menunjukkan bahwa kebijakan penertiban rumah kos dan penginapan telah memberikan dampak positif terhadap meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan serta mendukung terciptanya lingkungan yang lebih aman, tertib, dan kondusif. Namun demikian, masih ditemukan beberapa pelanggaran sehingga kegiatan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi secara berkelanjutan masih diperlukan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan keempat indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penertiban rumah kos dan penginapan di Kabupaten Bojonegoro telah berjalan dengan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sumber daya, penguatan koordinasi antarinstansi, serta peningkatan intensitas pengawasan agar pelaksanaan kebijakan mampu memberikan hasil yang lebih efektif dalam mendukung ketentraman dan ketertiban masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran sebagai

berikut.

1. Bagi Satpol PP Kabupaten Bojonegoro

Satpol PP Kabupaten Bojonegoro perlu meningkatkan intensitas pengawasan dan patroli secara berkala, terutama pada wilayah yang memiliki jumlah rumah kos tinggi. Selain itu, perlu dilakukan penguatan koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta RT/RW agar pengawasan terhadap rumah kos dapat dilaksanakan secara lebih efektif. Satpol PP juga perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pendataan rumah kos serta mengusulkan penambahan personel dan sarana operasional guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan penertiban.

2. Bagi Pemilik Rumah Kos

Pemilik rumah kos diharapkan lebih meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, seperti melengkapi perizinan usaha, melakukan pendataan identitas penghuni, serta bekerja sama dengan aparat pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Kepatuhan tersebut akan mendukung terciptanya lingkungan rumah kos yang tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan turut berpartisipasi dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan dengan melaporkan apabila ditemukan dugaan pelanggaran yang terjadi di rumah kos atau penginapan.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan penertiban rumah kos.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai penertiban rumah kos dengan menggunakan pendekatan atau model evaluasi kebijakan yang berbeda, seperti model William N. Dunn atau George C. Edward III, maupun dengan pendekatan kuantitatif atau mixed methods sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan penertiban rumah kos dan penginapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badan Nasional Sertifikasi Profesi. (2017). *Pedoman sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional*. Jakarta: BNSP.
- Cousins, B. L., & Earl, L. M. (1995). *Participatory evaluation in education: Studies in evaluation*. Sage Publications.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications Inc.
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2015). *The new public service: Serving, not steering*. Routledge.
- Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro. (2025). *Data pelatihan sertifikasi K3 tahun 2025*. Bojonegoro: Disperinaker.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Fatmawati, & Ansori. (2022). [Lengkapi judul artikel dan sumber jurnal]. Fitzpatrick, J. L., Sanders, J. R., & Worthen, B. R. (2011). *Program evaluation: Alternative approaches and practical guidelines*. Pearson Education.
- Gronroos, C. (2000). *Service management and marketing: Managing the moments of truth in service competition*. Lexington Books.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kerja*. Jakarta: Kemnaker RI.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2018a). *Pedoman keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di tempat kerja*. Jakarta: Kemnaker RI.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2018b). *Pedoman pelatihan berbasis kompetensi*. Jakarta: Kemnaker RI.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Keselamatan dan Kesehatan*

Kerja. Jakarta: Kemnaker RI.

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2018). *Management information systems: Managing the digital firm*. Pearson Education.

Lestari. (2020). Peran balai latihan kerja dalam mengurangi pengangguran terbuka. *Jurnal Kebijakan Publik*, 6(3), 77–89.

Malena, C. (2004). *Social accountability: An introduction to the concept and emerging practice*. World Bank.

McLaughlin, J. A., & Jordan, G. B. (1999). Logic models: A tool for telling your program's performance story. *American Journal of Evaluation*, 20(2), 201–212.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications Inc.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2016, Januari 14). *Bojonegoro berhasil raih prestasi program K3*. Diakses dari [website resmi Pemkab Bojonegoro](#)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

Pratama. (2021). [Lengkapi judul artikel dan sumber jurnal].

Pratiwi. (2021). Efektivitas program sertifikasi kompetensi dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja. *Jurnal Manajemen Publik*, 7(1), 22–34.

Raadschelders, J. C. N. (2011). *Public administration: The interdisciplinary study of government*. Oxford University Press.

Radar Bojonegoro. (2025, Februari 6). *Sebanyak 2.878 perusahaan di Bojonegoro belum memiliki peraturan perusahaan*. Diakses dari [Radar Bojonegoro](#)

Rahman. (2019). Implementasi keselamatan dan kesehatan kerja di dunia industri. *Jurnal Keselamatan Kerja*, 3(2), 60–72.

Saputra. (2021). Evaluasi program sertifikasi kompetensi tenaga kerja. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 101–115.

Scriven, M. (1991). *Evaluation thesaurus*. Sage Publications.

Simanjuntak, P. J. (2001). *Pengantar ekonomi sumber daya manusia*. Jakarta: LPFE UI.

Stufflebeam, D. L. (1966). *CIPP evaluation model*. Michigan: Western Michigan

University.

Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suma'mur. (2009). *Higiene perusahaan dan keselamatan kerja*. Jakarta: Sagung Seto.

Syamsuddin, M. (2019). Transformasi digital dalam birokrasi: Peluang dan tantangan. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 45–62.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Economic development* (11th ed.). Boston: Pearson.

Wibowo. (2020). Evaluasi program pelatihan kerja berbasis kompetensi di balai latihan kerja. *Jurnal Ketenagakerjaan Indonesia*, 5(2), 45–56.

World Bank. (2023). *The global identification challenge*. Washington, DC: World Bank Group

